



## Sebuah Khimera Keamanan: Dilema Kebijakan antara Keamanan Nasional dan Manusia di El Salvador

Vieri Abdurrafi<sup>1)</sup>, Abel Josafat Manullang<sup>2)</sup>

Universitas Padjadjaran, Indonesia

[vieri21001@mail.unpad.ac.id](mailto:vieri21001@mail.unpad.ac.id)<sup>1)</sup>

[abel20001@mail.unpad.ac.id](mailto:abel20001@mail.unpad.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Kebijakan keamanan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele sejak tahun 2019 berhasil merubah kondisi keamanan di El Salvador. Penelitian ini akan membahas dampak dari strategi militerisasi keamanan nasional karena kekerasan geng MS-13 dan Barrio 18 terhadap hak asasi manusia (HAM). Penangkapan massal anggota geng saat penetapan keadaan darurat negara melanggar prinsip-prinsip HAM yang menghilangkan aspek penting dari keamanan manusia serta menciptakan sebuah ilusi keamanan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif lewat studi literatur. Hasil penelitian ini adalah mengkaji ulang kebijakan keamanan Bukele yang menimbulkan dilema pengabaian terhadap hak-hak individu yang seharusnya dilindungi dalam konteks keamanan nasional. Kebijakan yang diterapkan oleh Bukele berhasil mengurangi angka kekerasan geng, tetapi juga menciptakan lingkungan yang represif bagi masyarakat El Salvador.

**Kata kunci:** El Salvador, Keamanan Manusia, Keamanan Nasional, Kekerasan Geng, Nayib Bukele

### Abstract

National security policies under the leadership of President Nayib Bukele since 2019 have transformed security conditions in El Salvador. This research will discuss the impact of the national security militarization strategy because MS-13 and Barrio 18 gang violence on human rights. The mass arrests of gang members during a state of emergency violate human rights principles that remove important aspects of human security and create an illusion of security. The method used is a qualitative method through a descriptive approach through literature study. The result of this research is a review of Bukele's security policy, which raises the dilemma of neglecting the rights of individuals who should be protected in the context of national security. Bukele's policies have reduced gang violence, but also created a repressive environment for the people of El Salvador.

**Key words:** El Salvador, Human Security, National Security, Gang Violence, Nayib Bukele

### PENDAHULUAN

Perubahan sifat keamanan terjadi di setiap generasi peradaban manusia. Dalam 20 tahun terakhir, ancaman keamanan telah mengalami perubahan dari *state-centric* menuju keamanan non-tradisional yang didasarkan pada aspek isu humanitarian. Fokus dari keamanan berbasiskan manusia mengacu kepada hak serta kebutuhan dasar, mulai dari penyakit, kemiskinan, sampai kriminalitas. Sesuai dengan apa yang disebut Roxborough (2001), perkembangan teknologi beserta meningkatnya arus informasi telah menstimulasi tantangan transisional ancaman di segala bidang, seperti maritim, kesehatan, lingkungan, dan ruang siber. Era baru globalisasi terus mempererat hubungan antar aktor negara dibarengi interdependensi ekonomi yang membuat

peperangan menjadi terhindarkan melalui pembentukan organisasi bilateral maupun multilateral semacam Organisasi Perdagangan Dunia dan Mahkamah Internasional. Seorang jurnalis bernama Thomas Friedman mempopulerkan konsep “Globalisasi” di akhir 1990-an dimana fenomena dinamis tersebut telah “menggantikan Perang Dingin sebagai basis sistem internasional” (Friedman, 2000). Bagi Friedman, globalisasi mengarah kepada kemajuan positif dalam hal integrasi negara-bangsa menjadi warga negara global dengan budaya berpikir yang hampir sama satu sama lain. Akan tetapi disatu sisi, globalisasi juga memiliki sisi gelapnya sebagai sumber penyebab konflik intranegara, terutama pada negara berkembang. Berbagai negara mengalami tantangan keamanan yang bersifat domestik, salah satunya ialah penjualan senjata api ilegal yang biasanya berkaitan dengan transaksi narkoba dan aktivitas kriminal antar geng di kawasan Amerika Latin serta Karibia. Maraknya kriminalitas domestik tersebut membuat melemahnya legitimasi pemerintahan serta mengancam keamanan individu masyarakat dikarenakan mereka merasa tidak aman beraktivitas sehari-hari. Bahkan, di kawasan Amerika Tengah, kelompok geng melebihi jumlah aparat kepolisian beserta militer yang bertugas. Secara langsung, keberadaan geng mengancam keamanan nasional negara yang telah diuntungkan dari fenomena globalisasi lewat penyebaran senjata api di pasar gelap yang membuat mereka dapat menyaingi pengaruh negara.

Dalam kasus El Salvador, masifnya kriminalitas akibat kegiatan antar kelompok geng menjadikannya menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia. Kisah El Salvador dapat ditelusuri kembali saat negara itu mengalami perang sipil berkepanjangan sejak tahun 1979-1992 dimana kelompok gerilyawan berideologi kiri, yakni *the Farabundo Martí National Liberation Front* (FMLN) dan kelompok nasionalis *Alianza Republicana Nacionalista* (ARENA) berperang satu sama lain yang menjadi bagian dari kompetisi proksi perang dingin antara Amerika Serikat beserta Uni Soviet. Perang sipil El Salvador merenggut sekitar 75.000 ribu jiwa serta memaksa masyarakat bermigrasi keluar negara. Akhirnya, setelah berdekade mengalami peperangan sipil, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang ditengahi oleh Costa Rica beserta PBB pada bulan Januari 1992 di Chapultepec, Meksiko (Nilsson, 2022). Semenjak penandatanganan perjanjian perdamaian, El Salvador berjalan di bawah kondisi keamanan yang relatif aman meskipun jumlah pembunuhan terus meningkat di setiap tahunnya.

Namun, dalam dekade 2010-an, El Salvador kembali mengalami fluktuasi peningkatan kekerasan antar geng, berpusat di ibukota San Salvador yang dicap sebagai kota paling berbahaya di dunia. Tingginya tingkat kejahatan disebabkan aktivitas *maras* atau geng yang saling berperang di berbagai kotamadya El Salvador serta kebijakan represif pemerintah untuk mengeliminasi anggota geng menggunakan angkatan bersenjata dalam rangka mencapai keamanan nasional (Valiani, 2023). Keamanan nasional disini berfokus pada “keamanan masyarakat” El Salvador dalam melindungi hak untuk hidup serta hak untuk kepemilikan properti pribadi sesuai prinsip hak asasi manusia. Perjanjian damai 1992 berusaha untuk memberikan pemisahan terhadap keamanan nasional pada pertahanan eksternal dengan domestik. Hal ini dilakukan terkini oleh Menteri Keadilan dan Keamanan Publik El Salvador guna melawan kriminalitas serta mengurangi tingkat kekerasan lewat penggunaan aparat kepolisian dibarengi militer disaat keadaan darurat negara. Namun, upaya tersebut di satu sisi menimbulkan permasalahan terhadap hak asasi manusia masyarakat El Salvador dibawah presiden Nayib Bukele disaat penetapan status keadaan darurat negara. Pencapaian keamanan nasional El Salvador sayangnya tidak sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia warganya sebab terjadi berbagai pelanggaran HAM didalamnya.

Sejak Bukele menjabat dari tahun 2019, ribuan warga Salvador yang dicurigai sebagai anggota geng mengalami penangkapan secara tiba-tiba tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu, penyiksaan di dalam penjara, hingga perpanjangan masa tahanan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kekuasaan politik Bukele memudahkannya dalam meloloskan aturan hukum nasional bagi penangkapan para gangster di berbagai daerah yang tentunya melanggar hukum humaniter internasional. Kebijakan tersebut mengundang reaksi keras dari organisasi HAM internasional beserta lembaga PBB. Kedua pihak menyerukan agar Bukele segera

memperbaiki kondisi kemanusiaan di El Salvador untuk masyarakat ataupun kriminal yang mengalami kekerasan oleh aparat bersenjata. Kemudian, alasan penulis mengambil topik ini adalah untuk menjelaskan bagaimana El Salvador bertransformasi dari yang tadinya menjadi negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi menjadi salah satu negara teraman secara global mengalahkan Amerika Serikat.

Tujuan dari penulisan ini ialah penulis ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan keamanan nasional dibawah presiden Nayib Bukele sejak menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang untuk melawan kehadiran kelompok geng berdasarkan latar belakang historis dan politik El Salvador menimbulkan dilema keamanan manusia di dalamnya. Penulis belum menemukan artikel jurnal yang secara mendalam membahas terkait topik ini dalam beberapa tahun terakhir sehingga penulis akan mengisi kesenjangan penelitian dengan membawa kebaruan berupa penggunaan data-data, literatur, dan fakta-fakta terkini terkait militerisasi keamanan nasional El Salvador oleh presiden Nayib Bukele serta konsekuensi pelanggaran HAM dalam konteks keamanan manusia sebagai akibat dari pemenuhan keamanan nasional tersebut.

Oleh sebab itu, penulis menemukan bahwa Bukele berhasil mereformasi sistem keamanan El Salvador dibandingkan pemerintahan sebelumnya dalam menumpas kelompok kriminal geng yang telah menteror masyarakat sejak dahulu lewat militerisasi aparat keamanan. Akan tetapi, proses perwujudan kebijakan keamanan nasional menimbulkan sebuah ilusi keamanan dibelakangnya dengan mengabaikan aspek keamanan manusia masyarakat El Salvador dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM saat Bukele menetapkan status keadaan darurat negara pada tahun 2022.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Dikutip dari buku "*Research Methods in Politics and International Relations*" ditulis oleh Christopher Lamont, metode kualitatif merupakan sebuah metode yang berfokus pada analisis data non-angka. Metode ini berfokus pada pemahaman makna dan dinamika dalam politik internasional dengan menyajikan data yang berbentuk tulisan atau lisan menggunakan penalaran induktif disertai pengamatan ilmiah periset (Lamont, 2020). Pengaplikasian metode kualitatif dapat dipakai untuk mencakup peristiwa, kawasan, organisasi, negara, atau individu. Pendekatan deskriptif menekankan pada pemaparan data dari berbagai fenomena yang terjadi, baik secara alami ataupun konstruksi manusia yang melihat karakteristik khusus serta keterkaitan antar variabel (Sukmadinata, 2013). Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif ialah tidak adanya intervensi peneliti terhadap data-data yang ditelaah sehingga menghindari manipulasi dalam menganalisis data sebagaimana adanya. Peneliti mengambil data kualitatif dari jurnal, buku, website resmi pemerintah El Salvador dari tahun 1992 sampai 2024 beserta laporan organisasi non-pemerintahan, lembaga HAM, sampai publikasi laman berita nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keamanan Nasional dan Keamanan Manusia

Dalam istilah populer, kata "keamanan" merujuk kepada ketiadaan ancaman. Kamus Bahasa Inggris Oxford mengartikannya sebagai "keadaan terlindungi dari atau tidak terkena ancaman, kebebasan dari kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan, perasaan aman atau bebas dari atau tidak adanya bahaya" (Oxford English Dictionary, 2025). Ide kunci dari konsep keamanan memiliki dua elemen: Orientasi kepada sumber ancaman serta fokus kepada siapa yang terancam dan bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut. Keamanan berpusat pada mitigasi resiko kondisi berbahaya yang signifikan. Rasa aman saat ini bukan hanya sekedar memenuhi kesejahteraan semata, tetapi juga untuk menghindari kondisi ketidakpastian yang ekstrem di masa depan. Isu keamanan sangat berkaitan dengan perpolitikan domestik maupun internasional suatu negara. Pada ranah domestik, keamanan bertujuan untuk menstabilkan serta menertibkan kehidupan bermasyarakat sebuah negara berdaulat. Sementara dalam ranah internasional keamanan bersifat anarkis sehingga bersifat tidak stabil yang membuat negara harus melindungi dirinya sendiri dari ancaman negara lain sesuai pendapat kaum realis.

Keamanan nasional dipahami sebagai kemampuan atau kapasitas negara dalam membendung ancaman melalui peningkatan kapabilitas kekuatan militer guna mengamankan negara dari bahaya sistem internasional anarkis (Heywood, 2014). Konsep modern keamanan nasional berakar dari sejarah perang 30 tahun di Eropa dan Perang Sipil Inggris pada abad ke-17. Setelahnya, Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 membentuk gagasan bahwa negara-bangsa memiliki kontrol atas wilayahnya bukan hanya urusan domestik saja, melainkan keamanan eksternal diluar teritorinya atas prinsip pertahanan diri negara berdaulat. Keamanan nasional (*national security*) diartikan menjadi suatu konsep dimana sebuah pemerintahan memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari berbagai masalah krisis nasional lewat kekuatan militer, ekonomi, maupun diplomasi (Amaritasari, 2015).

Konsep keamanan nasional dapat bermanfaat untuk melindungi nilai-nilai internal suatu negara dari ancaman pihak luar. Ide ini berkembang di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II berakhir dimana pada awalnya keamanan hanya berfokus kepada kemampuan militer, lalu bergeser menuju keamanan yang bersifat non-militer (Berkowitz, 2022). Semenjak serangan 9/11 pada tahun 2001, isu pertahanan nasional negara dari aktor non-negara mengalami pergeseran sebagai masalah keamanan nasional yang utama di dalam negeri. Prioritas utama keamanan nasional terletak pada perlindungan bangsa dan masyarakat dari serangan dan bahaya eksternal lainnya secara keseluruhan dengan mempertahankan angkatan bersenjata dan menjaga rahasia negara (Khan, 2022). Cakupan keamanan nasional meliputi, pertahanan negara dan perlindungan ancaman luar negeri seperti aspek geopolitik, ekonomi, dan kepentingan lainnya yang mempengaruhi bagaimana suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Keamanan manusia dalam studi Hubungan Internasional muncul setelah berakhirnya Perang Dingin. Literatur mengenai keamanan manusia pertama kali diterbitkan melalui laporan Human Development Report yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994. Inti dari laporan UNDP ini sebagian besar bersumber dari makalah yang ditulis oleh Mahbub ul Haq, seorang ahli ekonom serta politikus asal Pakistan. Mahbub merumuskan satu pertanyaan menarik terkait dengan keamanan, yaitu "*security for whom?*" Laporan UNDP kemudian menawarkan aktualisasi dari konsep utama dalam keamanan manusia. Pertama, keamanan manusia berarti rasa aman dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan pengekangan. Kedua, dapat didefinisikan sebagai perlindungan dari ancaman tidak terduga serta merugikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, ataupun komunitas sosial (UNDP, 1994). Laporan tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuh elemen kunci keamanan manusia, mulai dari keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan sosial, dan keamanan politik.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia 1994, UNDP memberikan penjelasan, justifikasi, agenda, indikator operasional, dan rekomendasi kebijakan yang berpusat pada konsep keamanan manusia. Para pakar dalam UNDP memandang bahwa konsep keamanan terlalu banyak dikaitkan dengan konflik militer dan hanya berpusat pada negara sebagai *referent object*, dan bahwasanya keamanan manusia juga mencakup hal-hal seperti "keamanan kerja, keamanan finansial, keamanan kesehatan, sampai keamanan dari kejahatan".

Lima belas tahun kemudian, Laporan Pembangunan Manusia Arab pada 2009 menyebutkan terminologi keamanan manusia secara lebih luas, yaitu kebebasan manusia dari ancaman-ancaman yang intensif, ekstensif, berkepanjangan, dan komprehensif yang membuat rentannya kehidupan dan kemerdekaan manusia" (UNDP, 2009). Laporan terbaru ini membantu membedakan antara keamanan nasional dan keamanan manusia dengan menegaskan poin sumber ancaman. Keamanan nasional berfokus pada ancaman militer, aktor yang mengancam negara biasanya datang dari negara lain, dan negara lain menjadi *referent object* utama. Di lain sisi, keamanan manusia menggeser perspektif keamanan konvensional sebelumnya dimana ancaman dapat lebih bervariasi, bahkan aktor negara dapat menjadi sebuah ancaman bagi individu itu sendiri. Objek ancaman keamanan manusia lebih spesifik lagi, yakni mencakup hak hidup beserta kebebasan seorang individu.

## Kekerasan Geng di El Salvador

Tingginya tingkat kriminalitas serta pembunuhan di El Salvador disebabkan oleh meningkatnya rivalitas antar geng di berbagai penjuru negara. Geng atau disebut dengan *maras* atau *pandilleros* dalam bahasa Spanyol merupakan kelompok kriminal beranggotakan orang-orang muda dalam kisaran umur 5 sampai 35 tahun yang memiliki identitas bersama biasanya lewat penyebutan nama, karakteristik simbol khusus (tato, pakaian, grafiti), dan kebiasaan bersama (Bravo, 2013). Geng atau *maras* sering dipandang sebagai fenomena kriminal berskala transnasional yang terorganisir secara informal dan bersumber di Amerika Serikat maupun Amerika Tengah. Sebuah kelompok geng dicirikan memiliki daerah teritorial mereka sendiri serta berkomplot melakukan aktivitas yang dilarang oleh hukum. Diestimasikan sebanyak 100.000 orang tergabung ke dalam organisasi geng di kawasan Amerika Tengah pada dekade 2010-an, antara 30.000 sampai 60.000 nya sendiri berada di El Salvador yang mencakup satu persen dari total populasi negara itu (El País, 2021).

Dengan menguasai wilayah yang luas di berbagai kota (per 2021 mencakup sekitar 81% total wilayah negara), organisasi kriminal geng meneror masyarakat El Salvador melalui pemerasan, pembakaran transportasi umum, serta melakukan pembunuhan terencana terhadap pejabat negara dan aparat keamanan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakamanan dan keadaan ancaman terus-menerus yang secara signifikan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat, sekaligus menantang sistem keamanan nasional El Salvador (Martínez-Reyes & Navarro-Pérez, 2021, hlm. 132).

Kekerasan geng di El Salvador menjadi isu utama keamanan nasional akibat dari kebijakan deportasi Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an. Pertumpahan darah dimana-mana telah menempatkan El Salvador di antara negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia sekaligus penjara-penjara yang terlalu penuh untuk ditempati. Selama 30 tahun terakhir, masyarakat El Salvador hidup dalam ketakutan mengalami penculikan, pemerkosaan, pemerasan, hingga pembunuhan oleh dua kelompok geng paling terkenal disana, yakni Mara Salvatrucha (MS-13) dan Barrio 18 (International Crisis Group, 2017). Kedua kelompok rival geng tersebut berasal dari kota Los Angeles. Sumber utama pendapatan mereka berasal dari pungutan paksa yang diambil dari warga sekitar sampai penjualan senjata serta obat-obatan terlarang. Mereka disebut sebagai diaspora Salvador di AS yang lalu kembali ke El Salvador melalui deportasi massal (González, 2024).

Asal muasal MS-13 dan Barrio 18 dapat ditelusuri saat terjadinya peristiwa perang sipil El Salvador dari tahun 1960-an sampai awal 1990-an. Selama konflik berlangsung, Amerika Serikat mendukung proksi pemerintahan guna melawan pasukan gerilyawan termasuk memberikan bantuan sokongan dana miliaran dolar untuk ekonomi dan militer kepada negara (Bonner, 2018). Akibat instabilitas kondisi keamanan dari perang sipil ini, banyak warga El Salvador memutuskan untuk bermigrasi dan menetap di Amerika Serikat, terutama di Los Angeles. Para remaja asal Amerika Tengah kemudian meminta perlindungan kepada geng Chicano (subkultur budaya Amerika Latin) yang memeras serta mengintimidasi mereka. Sebagai respon atas mekanisme pertahanan diri dari ancaman geng lain maka terbentuklah geng MS-13 dan Barrio 18 yang sama-sama beridentitas diaspora Salvador di AS.

Kedua geng berkembang dari geng berskala kecil menjadi geng berbasis penjara-penjara di AS sampai membentuk organisasi kriminal transnasional selama tahun 1990-an. Pada dekade tersebut, presiden Bill Clinton menandatangani sejumlah aturan hukum yang mengakibatkan gelombang deportasi imigran asal El Salvador yang memiliki latar belakang kriminal. Hukum-hukum yang ditetapkan Clinton meliputi *the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994*, *the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act*, dan *Antiterrorism and Effective Death Penalty Act 1996* (Valiani, 2023). Semua hukum tersebut berlaku sejak tahun 1998 serta 2010 yang memperluas cakupan persyaratan deportasi sehingga berkontribusi langsung dalam peningkatan imigran geng MS-13 dan Barrio 18 menuju El Salvador, Guatemala, serta Nikaragua.

## Respon Pemerintahan Nayib Bukele Melawan Kekerasan Geng

Kebanyakan warga El Salvador melihat kondisi perpolitikan negara sebagai korup dan tidak efektif. Dua partai besar, yaitu Arena beserta FMLN mendominasi politik selama tiga dekade, tetapi gagal dalam menyelesaikan permasalahan dasar negara, terutama memberantas organisasi kriminal geng. Kegagalan memperbaiki kondisi keamanan negara oleh kedua partai membuat masyarakat semakin pesimis dengan sistem politik El Salvador. Sebanyak 78 persen warga Salvador mengatakan partai politik tidak mewakili aspirasi mereka, 62,4 persennya setuju jika pemilihan umum hanya membuang waktu saja karena situasi negara tidak akan pernah berubah (Felzer, 2018). Klaim bentuk pemerintahan demokrasi juga tidak menjadi preferensi masyarakat El Salvador, meskipun 9 persen penduduk yakin situasi dapat lebih membaik dari sebelumnya. Akan tetapi, semua itu berubah ketika seorang politisi berumur 39 tahun bernama Nayib Bukele menjadi presiden El Salvador pada tahun 2019. Perjalanan karir politik Bukele dapat ditelusuri ketika ia pernah menjadi walikota Nuevo Cuscatlán (2012–2015) dan ibukota San Salvador (2015-2018). Pada bulan Oktober 2017, partai FMLN menuduh Bukele memecah belah internal partai, lalu mengeluarkan dia dari keanggotaan partai. Sebagai respons, Bukele mendirikan partainya sendiri *New Ideas* (*Nuevas Ideas*) pada 2017 serta mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden mewakili kubu konservatif-nasionalis *Gran Alianza por la Unidad Nacional* (GANU) yang anggotanya terdiri dari mantan aktivis partai ARENA.

Disamping itu semua, Bukele memprioritaskan isu keamanan nasional El Salvador yang terus memburuk dalam tiga dekade terakhir. Periode pemerintahannya ditandai dengan militerisasi aparat keamanan baik polisi maupun militer. Pada tahun pertamanya menjabat, pemerintah Bukele mengadakan wajib militer dan meningkatkan anggaran pertahanan negara. Di waktu yang sama, Bukele menekankan aparat kepolisian untuk memakai cara kekerasan disaat masyarakat merasa terancam oleh kelompok yang dicurigai sebagai anggota geng, meskipun mendapat penolakan keras dari aktivis HAM. Pada Februari 2021, pemerintah El Salvador memperluas tupoksi angkatan bersenjata untuk menangani keamanan domestik hingga akhir tahun 2021. Menurut Surat Keputusan Eksekutif Nomor 46, pasukan militer El Salvador akan mendukung aparat kepolisian dalam operasi gabungan untuk menjaga perdamaian internal, ketentraman, dan keamanan nasional (López, 2021). Pihak militer turut andil dalam kegiatan operasi patroli gabungan untuk mencegah tindak kriminal, melakukan penangkapan, dan mengambil bagian dalam melucuti kelompok geng di seluruh wilayah. Selain itu, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Bukele juga mengatur tugas angkatan bersenjata untuk melindungi perbatasan sekaligus keamanan di penjara-penjara dan kawasan pendidikan.

Di bawah Presiden Bukele, 10.000 tentara melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan nasional di mana lebih dari separuhnya sebanyak 5.000 lebih personil terlibat dalam operasi yang dilakukan dalam *the Plan de Control Territorial* atau Rencana Kontrol Teritorial (BBC News Mundo, 2022). Sebenarnya rencana tersebut sudah pernah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi Bukele mengimplementasikan rencananya langsung untuk lebih lanjut memberantas organisasi kriminal geng dan memperbaiki situasi keamanan sesuai janji kampanyenya. Namun, pemerintah Bukele tidak ingin mempublikasikan detail Rencana Kontrol Teritorial karena dianggap akan menghambat berjalannya rencana. Masyarakat hanya mendapatkan 10 persen informasi saja secara umum sesuai kemauan pemerintah, sisa 90 persennya tetap dirahasiakan. Pelaksanaan tiga tahapan Rencana Kontrol Teritorial membutuhkan dana yang fantastis sebesar 575 juta dolar AS melalui mekanisme peminjaman ke lembaga organisasi internasional (ARPAS, 2020).

Dua tahun setelah Rencana Kontrol Teritorial, pada tanggal 26 Maret 2022, kekerasan di El Salvador mencapai puncaknya ketika laporan pihak kepolisian menyebut terjadi kasus 62 pembunuhan dalam satu hari yang membuat Bukele mendeklarasikan status keadaan darurat negara sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas gangster. Jumlah aparat kepolisian nasional yang bertugas sebanyak 28.000, diungguli jauh oleh kehadiran geng di beberapa penjuru wilayah El Salvador (BBC, 2022).

Guna memitigasi menyebarnya kehadiran geng, anggota parlemen merumuskan undang-undang baru yang awalnya berlaku selama satu bulan dimana berisi larangan berkumpul di tempat umum, mengizinkan penangkapan langsung tanpa surat peringatan, serta memantau komunikasi masyarakat. Beberapa hari setelah terjadinya kasus pembunuhan oleh organisasi geng, dewan legislatif mengesahkan aturan hukum yang menaikkan durasi masa tahanan bagi anggota geng dari rentang 20 tahun hingga 30 tahun di penjara dibandingkan aturan lama yaitu 10 tahun masa tahanan (Reuters, 2022). Hingga tahun 2025, penetapan status darurat negara telah diperpanjang sebanyak delapan kali serta masih berlangsung hingga saat ini.

### **Ancaman Keamanan Manusia Akibat Kebijakan Keamanan Nasional Bukele**

Penetapan status darurat negara oleh Presiden Bukele menandakan langkah kebijakan negara yang menggunakan metode represif untuk melawan kekerasan. Sebagai kelanjutan dari Rencana Kontrol Teritorial, penetapan tersebut justru menimbulkan sebuah ilusi keamanan nasional yang tercapai berupa pengabaian hak asasi manusia dan demokrasi. Kepemimpinan Bukele sejak 2019 cenderung otoriter dengan memanipulasi nilai beserta norma demokrasi, salah satunya mengubah konstitusi negara supaya ia bisa terpilih kembali pada periode selanjutnya di 2024. Selama lima tahun kepemimpinannya, tidak ada mekanisme *checks and balances* selain “kondisi pengecualian” tertentu yang sejalan dengan kebijakan pemerintah (Reuters, 2022). Pemerintah memanipulasi data statistik kejahatan selagi meringkus jurnalis yang mencoba mengungkap fakta sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Pelanggaran HAM serius menjadi hal yang paling terlihat di dalam rezim Bukele akibat lemahnya konstitusi hukum serta represifnya kebijakan keamanan nasional yang diterapkan negara. Semua proses dijalankan tanpa adanya transparansi hukum, anggaran negara, hingga terbatasnya akses informasi yang terbuka kepada publik yang membuat El Salvador berada di dalam situasi krisis keamanan manusia. Kebijakan represif tersebut termanifestasi dalam penangkapan massal secara membabi buta terhadap siapa saja yang memiliki karakteristik sebagai anggota geng, misalnya memiliki tato, catatan kriminal, bahkan “terlihat gugup” di depan aparat keamanan. Sebagai akibat dari penangkapan besar-besaran oleh pemerintah, El Salvador kini memiliki populasi penjara tertinggi di dunia sekitar 110.000 tahanan, tiga kali lipat dari Amerika Serikat serta dua kali lipat dari negara Kuba (World Prison Brief, 2024).

Lebih jauh lagi, Bukele baru-baru ini membangun serta membuka penjara baru sekaligus terbesar di Amerika Tengah bernama *the Terrorism Confinement Center* atau *Centro de Confinamiento del Terrorismo* (CECOT). Penjara ini terletak di kota Tecoluca, 72 km arah timur dari ibukota San Salvador. Tujuan dibangunnya penjara ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tahanan hingga mencapai 40.000 orang dalam keadaan penuh maksimal, artinya tiap tahanan hanya memiliki ruang sempit kurang dari 60 cm di dalam masing-masing sel penjara sebanyak 60 sampai 70 orang (Financial Times, 2023). Pembukaan CECOT dilandaskan pada kebijakan presiden AS, Donald Trump untuk mendeportasi kelompok gangster asal Venezuela ke El Salvador melalui aturan *the Alien Enemies Act of 1798* yang hanya digunakan AS tiga kali dalam sejarah. Kedatangan imigran asal Venezuela tersebut diyakini berasal dari geng Tren de Aragua. Geng Tren de Aragua muncul dari sebuah penjara yang terkenal tidak memiliki hukum di Venezuela dan menyertai gelombang eksodus jutaan warga Venezuela. Sebagian besar dari mereka mencari kondisi kehidupan yang lebih baik setelah hancur dalam dekade terakhir akibat kegagalan manajemen ekonomi.

Berbagai pelanggaran HAM di bawah pemerintahan Bukele mengundang kecaman keras dari sejumlah pihak, mulai dari aktivis HAM, jurnalis, hingga lembaga internasional. Menurut *the Organization of American States*, respon keras Bukele khususnya pada penangkapan massal tanpa melalui proses hukum akan mengancam hak dasar masyarakat (Council on Foreign Relations, 2022). Perwujudan keamanan nasional tidaklah harus mengorbankan HAM, melainkan berfokus pada meminimalisir ketimpangan sosial pada anak-anak yang tinggal di komunitas terpinggirkan rawan perekrutan geng. Mereka menegaskan bahwa peningkatan kesempatan kerja serta akses terhadap pendidikan dapat membuat keadaan menjadi lebih baik.



Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, membuat pernyataan tentang keprihatinannya terkait gelombang kekerasan yang terjadi di El Salvador di mana ia menyatakan “solidaritasnya dengan rakyat El Salvador di masa sulit ini” (United Nations Secretary-General, 2022). Dalam pidatonya, Dujarric yakin semua langkah pemerintah yang diambil sebagai respons terhadap situasi keamanan tersebut akan sesuai dengan penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Selain itu, pemerintah harus dapat memastikan keamanan warga El Salvador dengan mengambil langkah-langkah yang berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dan membubarkan geng-geng yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keamanan nasional pemerintahan Nayib Bukele sejak tahun 2019 berhasil mengurangi angka kekerasan akibat geng di El Salvador. Kebijakan yang diimplementasi pemerintah El Salvador disebabkan tekanan publik untuk segera menyelesaikan permasalahan keamanan yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Strategi militerisasi aparat keamanan kepolisian dan militer menghasilkan lingkungan yang sangat represif terhadap masyarakat El Salvador. Justifikasi pemenuhan keamanan nasional dengan memberantas kehadiran organisasi gangster akibat semakin memburuknya situasi keamanan meninggalkan elemen keamanan manusia yang tidak ditangani lebih lanjut, akibatnya terjadi banyak pelanggaran HAM didalam prosesnya. Kekuasaan yang tidak terbatas tanpa adanya mekanisme demokrasi dengan cara memanipulasi konstitusi hukum nasional membuat Nayib Bukele bisa sewenang-wenang menangkap serta memenjarakan siapapun yang berasosiasi dengan geng. Kebijakan keamanan ini menjadi instrumen permanen pemerintah dalam melawan kehadiran geng sampai saat ini. Dampaknya, terjadi sebuah ilusi keamanan dimana negara berhasil menurunkan angka kejahatan, tetapi mengorbankan hak-hak keamanan individu dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan setara untuk mewujudkan keamanan nasional itu sendiri. Untuk memenuhi kedua aspek keamanan diatas, baik keamanan nasional dan keamanan manusia, alangkah baiknya pemerintah El Salvador melakukan peninjauan ulang atas kebijakan keamanan yang diimplementasikan berdasarkan resolusi akar masalah yang sebenarnya terjadi. Penulis memiliki saran bagi penelitian selanjutnya agar lebih berfokus kepada langkah-langkah multidimensional yang dibutuhkan dalam menangani situasi keamanan di El Salvador secara komprehensif dengan memperhatikan efeknya terhadap masyarakat sipil baik secara langsung maupun jangka panjang. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan solusi konkret yang dapat membantu berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan keamanan yang lebih baik dan humanis bagi seluruh masyarakat El Salvador.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. Jurnal Keamanan Nasional. 1. 10.31599/jkn.v1i2.21.
- ARPAS. (4 Juni, 2020). Seguridad pública en primer año de gobierno de Bukele ¿más de lo mismo?. <https://arpas.org.sv/2020/06/seguridad-publica-en-primer-ano-de-gobierno-de-bukele-mas-de-lo-mismo/>
- BBC. (27 Maret, 2022). El Salvador: State of emergency after 62 gang killings in a day. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-60893048>
- BBC News Mundo. (4 Desember, 2022). *El Salvador: el impresionante despliegue de 10.000 soldados por parte de Nayib Bukele contra las maras en un municipio aledaño a la capital.* BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63830506#:~:text=El%20presidente%20de%20El%20Salvador,represi%C3%B3n%20masiva%20contra%20las%20pandillas.>



- Berkowitz, M. J. (2022). Dominance or deterrence? The role of military power in addressing challenges to US national security interests. *Comparative Strategy*, 41(6), 513-525.
- Bonner, R. (2018). America's role in El Salvador's deterioration. *The Atlantic*, 20, 2020-10.
- Bravo, R. (2013). *Maras en Centroamérica y en México* (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador). Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Madrid.
- Council on Foreign Relations. (2022, Oktober 19). The Organization of American States. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgroundunder/organization-american-states>
- El País. (2021, 24 Agustus). Una investigación arroja nuevas pruebas de la negociación de Bukele con las pandillas de El Salvador. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://elpais.com/internacional/2021-08-24/se-publican-nuevas-pruebas-sobre-la-negociacion-de-bukele-con-las-pandillas-de-el-salvador.html>
- Felzer, S. (2018). FY2018 El Salvador Country Opinion Survey Report (English). Country Opinion Survey (COS) Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/287361572424758338>
- Friedman, T. L. (2000). *The Lexus and the olive tree: Understanding globalization*. Farrar, Straus and Giroux.
- González, M. J. S. (2024). De las políticas de mano dura a la política del estado de excepción en El Salvador. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 79(776), 13-46.
- Heywood, A. (2014). *Global politics* (Vol. 19). Bloomsbury Publishing.
- International Crisis Group. (19 Desember, 2017). El Salvador's Politics of Perpetual Violence. Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/el-salvador/64-el-salvadors-politics-perpetual-violence>
- Khan, E. M. (2022). Comprehensive national security: Contemporary discourse. *Margalla Papers*, 26(I), 1-17.
- Lamont, C. (2020). *Research methods in politics and international relations*.
- López, A. (6 Februari, 2021). El Salvador prolonga por un año las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Diambil 28 Maret 2025, Infodefensa.com, dari: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3124074/salvador-prolonga-ano-tareas-seguridad-publica-fuerzas-armadas>
- Martínez-Reyes, A., & Navarro-Pérez, J. J. (2021). De la Mano Dura al Enfrentamiento Directo: vaivenes de las políticas públicas en El Salvador. *Revista de Sociología e Política*, 27, e002.
- Nilsson, M. (2022). Nayib Bukele: populism and autocratization, or a very popular democratically elected president?. *Journal of Geography, Politics and Society*, 12(2), 16-26.
- Oxford University Press. (2025). *Oxford English Dictionary*. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://www.oed.com>



- Pocasangre, O. (2021, Februari 24). Why El Salvador's Multi-Party System Is On the Brink of Collapse. El Faro. <https://elfaro.net/en/202102/columnas/25273/Why-El-Salvador%E2%80%99s-Multi-Party-System-Is-On-the-B>
- Roxborough, I. (2001). Hart-Rudman Commission and the Homeland Defense. Office of Justice Programs. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/hart-rudman-commission-and-homeland-defense>
- Sukmadinata, N. (2013). Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UNDP. (1994). Human Development Report 1994. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- UNDP. (2009). Arab Human Development Report 2009. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://www.undp.org/publications/arab-human-development-report-2009>
- United Nations Secretary-General. (2022, 29 Maret). Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on El Salvador. United Nations. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-29/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-el-salvador-scroll-down-for-spanish>
- World Prison Brief. (2024). Highest to Lowest - Prison Population Rate. World Prison Brief. [https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison\\_population\\_rate?field\\_region\\_taxonomy\\_tid=All](https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All)
- Valiani, S. (2023). The War on Gangs: El Salvador's Playground for International Human Rights Violations. U. Miami Inter-Am. L. Rev., 55, 255.